SINERGI SIPIL-MILITER DALAM MEMPERKUAT STRATEGI PERTAHANAN NEGARA KEPULAUAN

Adityo Nugroho

"Marilah, seluruh barisan, badan-badan berjuang sungguh-sungguh dan jangan membiarkan rakyat menjadi korban"
(Panglima Besar Jenderal Soedirman).

Pernyataan Sang Jenderal Besar tersebut tentu masih sangat relevan pada kondisi saat ini. Barisan atau badan, baik sipil – *Civil Society* maupun militer (TNI), keduanya merupakan rakyat Indonesia yang sudah seharusnya berjuang tanpa segregasi demi mempertahankan tanah air. Hal tersebut menjadi kata kunci dalam menghadapi arus zaman yang semakin dinamis dan kompleks dengan segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)-nya.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki laut dan jumlah pulau yang besar dengan panjang garis pantai 95.181 Km dan luas wilayah lautan 5,8 juta Km persegi telah mendominasi keseluruhan luas teritorial NKRI (Kusumastanto, 2014). Dengan begitu, pembangunan maritim seharusnya menjadi orientasi pembangunan nasional yang sangat penting dan mendesak. Sondakh (2004) berpandangan bahwa pengelolaan laut secara profesional dan proporsional harus diarahkan kepada kepentingan asasi bangsa Indonesia.

Melindungi segenap bangsa dan tanah air menjadi kepentingan yang tak terelakan bagi Indonesia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Berangkat dari perkembangan *Maritime Domain Awareness* (MDA) yang intinya adalah *effective understanding of anything associated with the maritime domain that could impact the security, safety, economy, or environment,* maka tuntutan membangun strategi pertahanan negara kepulauan wajib dilakukan pemangku kebijakan.

Tentunya, TNI Angkatan Laut (AL) sebagai *leading sector* pertahanan di laut, bahkan pembangunan maritim bangsa, tidak bisa berdiri sendiri dalam mengembangkan strategi ini. Hal itu sesuai dengan prinsip negara gotong royong yang dikemukakan *founding fathers* pada 1945 di bawah naungan Pancasila (Kansil, 1994). Dalam perjalanan sejarah, TNI AL yang awalnya merupakan kaum bahariwan, yakni rakyat yang memiliki ilmu pengetahuan maritim hasil tempaan Sekolah Pelaut Belanda dan Jepang, ditambah masyarakat pesisir hasil ilmu turun temurun dari nenek moyangnya, telah mengembangkan konsep maritim bangsa di awal kemerdekaan.

Dengan pola sederhana, berbagai lompatan besar pun dapat dicapai di masa itu. Mulai dari pembangunan kekuatan TNI AL (dulu BKR-TKR Laut, kemudian menjadi ALRI), hingga konsep

kewilayahan negara dalam bingkai Deklarasi Djuanda 1957. Pada era itu, kekuatan maritim Indonesia cukup disegani baik di kawasan maupun global.

Pesan Sang Proklamator Bangsa, Ir. Soekarno mengenai "*Jas Merah – Jangan sekali-kali melupakan Sejarah*" begitu melekat dalam konteks saat ini. Dahulu kita bisa bergotong royong mengapa sekarang tidak bisa? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kuncinya, melalui *ocean leadership* yang baik, maka mampu menggerakkan seluruh potensi maritim bangsa untuk satu tujuan, yakni terwujudnya negara maritim yang digdaya.

Baik sipil-militer maupun antarinstansi (K/L) sudah seharusnya tidak ada lagi sekat atau ego sektoral atas nama "Merah Putih". Berdasarkan pengalaman satu dekade terakhir, visi Poros Maritim Dunia dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bisa dibilang gagal total. Visi yang baik dan begitu luhur itu tak berdaya dalam tataran implementasinya karena masih suburnya ego sektoral.

Memandang hari ini dan yang akan datang, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, karakter gotong royong dan musyawarah mufakat harus ditumbuhkembangkan kembali. Tidak terkecuali dalam konteks strategi maritim yang turunannya merupakan strategi pertahanan di laut.

Panjaitan (2017) mengemukakan bahwa berdasarkan sifat gotong royong, pokok pembangunan nasional yang berdasarkan agenda aksi serta kebijakan penyelenggaraan pertahanan, sinergi seluruh masyarakat dalam keamanan dan pertahanan maritim sangat dibutuhkan. Terutama untuk mengelola sumberdaya alam kelautan dan mengamankan pulau-pulau terdepan sebagai kekuatan pertahanan guna membangun perkembangan ekonomi maritim dalam rangka menjamin integritas dan kedaulatan NKRI.

Kendati gotong royong menjadi hal yang sulit saat ini, meski mudah diucapkan namun sering nol besar dalam praktiknya, maka tetap harus dicoba dan dimulai. Penulis perlu ingatkan mengenai falsafah bangsa Pancasila yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa (YME). Simpelnya, gotong royong kembali kepada Tuhan YME alias Ikhlas dan tawakal. Begitulah pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman "*Hendaknya perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan*". Rumusnya, dengan keikhlasan dalam membangun bangsa di sektor maritim, pertolongan Tuhan pasti akan datang.

Menjawab Asta Cita

Misi Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita merupakan modal dasar mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam poin kedua tertulis "*Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".*

Sudah tentu, tolok ukur kemantapan sistem pertahanan di Indonesia berdasarkan geografisnya ialah pertahanan di laut atau negara kepulauan. Terlebih, dalam hirarki keredaksian dalam poin tersebut dapat ditafsirkan



muara dari sistem pertahanan itu ialah tercapainya ekonomi biru untuk keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Hal itu sejalan dengan konsep pertahanan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 pada Bab 2 Pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan bahwa *"Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan".* Indonesia yang merupakan negara kepulauan, tentu saja sistem pertahanannya harus disesuaikan dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Maka penyusunan konsep pertahanan sesuai geografis harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan semua pihak yang berkecimpung atau *concern* di laut. Penulis sepakat perlu ada yang mengorkestrasi penyusunan konsep tersebut. Maka TNI AL sesuai dengan peran fungsinya dalam pertahanan negara layak menjadi ketua kelasnya.

Oleh karena itu, peran Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando AL (Pusjianmar Seskoal) sebagai *think tank* dan *incubator* gagasan maritim bangsa yang menjembatani semua pihak perlu memulainya. Produk kajiannya akan menjadi landasan kebijakan bukan hanya untuk TNI AL saja, melainkan dalam lingkup yang lebih luas menuju *good maritime governance.*

Ketika bicara konteks pertahanan, peran sipil hanya sebagai komponen pendukung dan cadangan dari TNI AL. Sebagai pendukung, maka sumbangsih yang paling konkret ialah memberikan selayang pandang, masukan, gagasan hingga pemikiran untuk menjadi rumusan baku kebijakan.

Tinggal diperlukan *Standard Operational Procedure* (SOP) hingga *Role of Engagement* (ROE) yang mumpuni dalam tataran praktisnya. Strategi Pertahanan Negara Kepulauan akan bermuara pada *sea power* yang diawali dengan adanya *awareness* dari suatu pemangku kebijakan (pemerintah) dan rakyat.

Taufiqoerrachman (2019) menegaskan bahwa *sea power* tidak semata mencakup armada kapal perang saja, tetapi juga melingkupi segenap potensi kekuatan maritim nasional, seperti armada niaga, armada perikanan, industri jasa maritim dan masyarakat maritim. Jadi *sea power* tidak hanya menjadi monopoli angkatan laut berikut armada tempurnya.

Terkadang, *naval capability* sangat tepat buat dijadikan parameter terwujudnya *sea power*. Marsetio (2014) menegaskan bahwa cita-cita *sea power* mencakup *to be world class navy,* yang tersusun secara gradual, dimulai dari *the way ahead as a world class navy,* kemudian *pursue as a world class navy*. Dan terakhir adalah *go forward as a world class navy.*

Inilah yang menjadi dasar bagi pembangunan dan pembinaan TNI AL ke depan untuk dapat mengaplikasikan konsep *sea power* dalam rangka pertahanan negara dan keamanan secara luas. Menurut Marsetio, empat indikator untuk mencapai TNI AL berkelas dunia, yakni terciptanya keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Teknologi dan Operasi. Hal itu menjadi bagian penting dalam melaksanakan keberhasilan strategi pertahanan maritim.

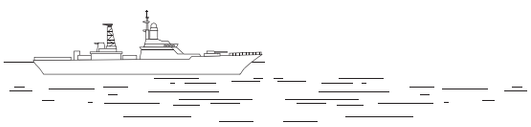

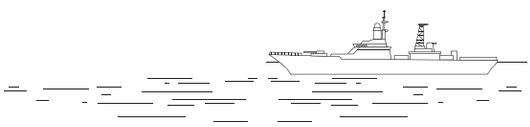

Sinergi sebagai Solusi

Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan mencapai cita-cita tersebut. Berkaitan dengan penguatan pertahanan laut yang ditentukan sejauh mana pencapaian pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sukma (2014) menekankan *Minimum Essential Force* (MEF) harus menjadi *Dynamic Essential Force* (DEF), pada saat anggaran pertahanan harus mencapai minimal 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kita.

Melihat perkembangan ekonomi terakhir di Indonesia, terutama usai dilanda pandemi Covid-19, pertumbuhan masih belum bisa beranjak di sekitar 5%. Ditambah utang negara yang kian meningkat, maka sulit membangun kekuatan pertahanan yang ideal dalam menghadapi perkembangan zaman.

Akan tetapi, tidak ada sesuatu yang sulit jika bersinergi. Walton dalam Sulasmi (2009), mendefinisikan istilah 'sinergi' paling sederhana, yakni hasil upaya kerja sama atau '*co-operative effort*'. Karena itu, inti dari proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerja sama. Menurut Covey, bersinergi lebih dari sekadar bekerja sama, melainkan untuk menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerja sama. Maka dari itu, dinyatakan oleh Covey sebagai suatu '*creative cooperation*'. Arti mudahnya bagi penulis, sinergi adalah gotong royong.

Segala hal bisa disiasati sedemikian rupa untuk mencapai yang terbaik bagi bangsa dan negara jika kita bergotong royong. Dalam konteks pertahanan, parameter dari rasa aman tentu ketika ancaman berkurang atau bernilai nol (tidak ada).

Mangindaan (2013) menggambarkan kondisi itu dalam suatu formula. *Threat* (ancaman) akan terjadi apabila ada perkalian antar unsur *intention* (niat), *capability* (kemampuan), dan *circumstance* (kondisi-pengkondisian) yang sedang berjalan bersamaan. Sebaliknya, perkalian akan menghasilkan nol, apabila salah satu unsurnya sama dengan nol. Inilah yang menjadi fungsi pertahanan untuk memberikan efek getar (kepada lawan atau pihak yang ingin mengancam) serta intelijen dalam mendapatkan pengetahuan tentang unsur-unsur tersebut.

Besaran ancaman sangat tergantung pada besaran tiap elemen atau unsurnya. Sistem pertahanan hanya salah satu cara dalam meniadakan ancaman tersebut. Cara lainnya bisa menggunakan kemampuan diplomasi yang baik, misalnya dalam membangun kerja sama kawasan serta mencari kawan sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan teori Ken Booth, TNI AL juga memiliki peran diplomasi maritim, sehingga sudah tentu harus membangun jejaring seluas-luasnya dalam menyerap informasi mengenai kondisi di dalam dan luar negeri. Hasil diplomasi itu sejatinya juga bisa menjadi *feed back* kepada penguatan Strategi Pertahanan Negara Kepulauan.

Clutterbuck dalam Cronin (2009) menguraikan strategi untuk menghadapi ancaman (termasuk terorisme), negara dapat menggunakan pendekatan lunak (*soft approach*) dan pendekatan keras (*hard approach*) secara simultan. Itulah gambaran antara pertahanan dengan diplomasi, yang tak ubahnya ibarat laut dan pantai.



Sinergi sipil-militer menjadi solusi dalam rangka memperkuat itu semua. Sinergi antar K/L pun jangan hanya selesai di acara seremonial seperti seminar, FGD, *coffee morning, lunch, dinner* dan sebagainya, melainkan harus terformulasikan menjadi kebijakan hingga mencakup implementasinya.

Pusjianmar Seskoal harus menjadi garda terdepan dalam sinergi itu pada bingkai kajian bersama atau istilah luhurnya 'musyawarah-mufakat' untuk merumuskan kebijakan maritim. Lembaga ini harus menjadi *role model* bagi urgensi pembentukan kembali Dewan Maritim Indonesia (DMI) atau Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) sebagai wadah yang mempertemukan seluruh stakeholder maritim. Akhir kata, penulis mengutip Gunaratna (2007) yang menuliskan dengan indah mengenai konsep perang, "*The battle concept was total war by pen and gun, by word and bullet, by tongue and teeth.*

Referensi

Cronin, Audrey Kurth, (2009). *How Terrorism Ends: Understanding The Decline and Demise of Terrorist Campaigns*. Princeton University Press.

Gunaratma, Rohan (2007). *The Ideological War on Terror*. Abingdon. Routledge.

Kansil, CST (1994). *Pancasila dan UUD 1945.* Jakarta: PT Praditya

Kusumastanto, Tridoyo (2014). *Penguatan Struktur Ekonomi Maritim Sebagai Mainstream Pembangunan Nasional.* Maritime Review. Jakarta: Persatuan Purnawairawan Angkatan Laut.

Lloyd, Richmond (1996). *Strategy and Force Planning*. Naval War College, Neport, RI, 1996.

Mangindaan, Robert (2013). *Intelijen Maritim: Suatu Wacana Yang Terpinggirkan.* Quarter Deck. Jakarta: FKPM.

Marsetio (2104). *Sea Power Indonesia.*, Jakarta: Universitas Pertahanan.

Panjaitan, M. K. K. B. (2017). *Peran Pemuda Sebagai Kader Bela Negara Dalam Mendukung Pertahanan dan Keamanan Maritim*. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, *9*(2).

Setianegara, Herry (2014). *Strategi Maritim pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia.* Yogyakarta: Leutika Prio.

Sukma, Rizal (2014). *Implementasi Identitas Kemaritiman Dalam Bidang Pertahanan Dan Keamanan Nasional.* Maritime Review. Jakarta: Persatuan Purnawairawan Angkatan Laut.

Sondakh, B.K (2004). *Urgensi Kepemimpinan Nasional Bervisi Kelautan Dalam Perspektif Pertahanan dan Keamanan.* Prosiding Indonesia Ocean Outlook 2004 "Laut Masa Depan Bangsa". Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Kelautan (PK-SPL-IPN).

Taufiqoerrachman, Achmad (2019). *Kepemimpinan Maritim: Sebuah Memoar*. Yogyakarta: Pandiva Buku.

